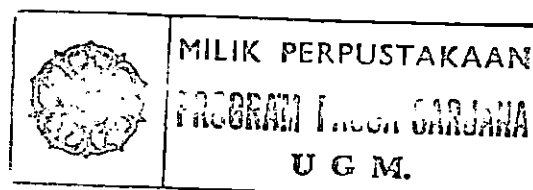


## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J., 1990, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat-Daerah di Indonesia: Studi Kasus Propinsi D.I.Aceh, DKI Jakarta, dan Jawa Timur, *Disertasi Doktor UGM*, Yogyakarta (Tidak Dipublikasikan)
- Asrori, B.S., 2000, Faktor-faktor yang Mempengaruhi kemampuan Untuk Melaksanakan Otonom Daerah di Yogyakarta, *Tesis PPS UGM*, Yogyakarta, (Tidak Dipublikasikan).
- Brown, Timothy H., 1999, Economic Crisis, Fiscal Decentralization and Autonomy : Prospects for Natural Resources Management, *Paper*, International Conference on "the Economic Issues Facing the New Government".
- Davey, K.J., 1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, Edisi Terjemahan, UI Press, Jakarta.
- Devas, N., 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Edisi Terjemahan, UI Press, Jakarta.
- Hikmah, Rouhaty Nur, 1999, Analisis Struktur Penerimaan Daerah dan Posisi Fiskal Kotamadya dan Yogyakarta 1996/1997, *Tesis PPS UGM*, (Tidak dipublikasikanP.
- Kaho, Y.R., 2001, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Koswara, E. 2000, Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-undang No 22 Tahun 1999: Suatu Telaahan dan Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya, *Analisis CSIS*, No. 1, 51-52.
- Kuncoro, M., 1995, Desentralisasi Fiskal di Indonesia, Dilema Otonomi dan Ketergantungan, *Prisma*, No.4, 3 -17.
- Lavrov, Aleksei, John M. Litwack, Douglas Sutherland, 2000, Fiscal Federalist in Russia : A Case for Subnational Autonomy, *Paper*, Organization for Economic Co-operation and Development.
- Mardiasmo., 2000, Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah 2001, *Makalah Seminar Lustrum I Program Studi MEP, HIMEP*, Yogyakarta.



- Munawir, H.S., 2000, *Perpajakan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Musgrave, Richard A., dan Musgrave Peggy B., 1993, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Kedua, (Terjemahan : Alfonsus Sirait, dkk.), Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Nazara, Suahasil, 1997. "Struktur Penerimaan Daerah Tingkat Propinsi di Indonesia", *Prisma*, 3 Jakarta; LP3ES, 17-25.
- Putra, Aulia, 2002, .Ketergantungan Keuangan Propinsi Naggroe Aceh Darussalam (NAD), Studi Kasus : Kabupaten Aceh Tengah Sebelum Otonomi Umum, Saat Otonomi Umum, dan Saat Otonomi Khusus, *Tesis PPS UGM*, (Tidak dipublikasikan).
- Radianto, Elia, 1997, Otonomi Keuangan daerah Tingkat II Suatu Studi di Maluku, *Prisma*, VOL. IX , No. 3. 24 – 37.
- Reksohadiprodjo, Sukanto, 2000, *Ekonomika Publik*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Republik Indonesia,1999. *Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*
- \_\_\_\_\_,1999. *Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*
- \_\_\_\_\_,1999. *Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.*
- \_\_\_\_\_,2000. *Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Wewenang Pusat dan Propinsi.*
- \_\_\_\_\_,2001. *Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.*
- Tumilar, R.L.H., 1997, Otonomi Keuangan Dan Ekonomi Daerah Tingkat II Di Propinsi Sulawesi Utara, *Tesis PS IESP UGM*, Yogyakarta.
- Widodo, HG. Suseno Triyanto, 1990, *Indikator Ekonomi : Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.